



Krisis Perbankan Nasional dalam Terapan Early Warning System (EWS)

Nadia Sasri W

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Article Infortion

Article history:

Received 2 December 2017;

Received in revised form 20

January 2018; Available online 31

January 2018

ABSTRACT

The purpose of this research is the research and development of the industrial sector's economy to the agricultural sector, as well as the influence of agricultural and industrial sectors on economic growth in Indonesia. The data used is time series data, 1960-2015. The method used in this research is Vector Error Correction Model (VECM). From the estimation results, it is concluded that the economic growth rate and the industrial sector negatively affect the agricultural sector, it can be said that the increasing economic growth achieved in Indonesia has increased the industrial sector and lower the agricultural sector. While the results of research that the agricultural sector negatively affect the economic growth while the industrial sector positively affects economic growth, in the sense that the agricultural sector has a bad contribution in economic growth in Indonesia.

Keywords: Real exchange rate, real interest rate, inflation, fiscal balance and GDP ratio

Tujuan dari penelitian ini adalah menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi maupun sektor industri terhadap sektor pertanian, Serta pengaruh sektor pertanian dan industri terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Data yang digunakan adalah data time series, tahun 1960-2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Vector Error Correction Model (VECM). Dari hasil estimasi yang dilakukan, disimpulkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dan sektor industri mempengaruhi negatif pada sektor pertanian, berarti dapat dikatakan bahwa semakin meningkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai di Indonesia semakin meningkat sektor industri dan menurunkan sektor pertanian. Sedangkan hasil penelitian bahwa sektor pertanian berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi sementara sektor industri berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dalam arti sektor pertanian memiliki kontribusi buruk dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Kata kunci: Nilai tukar riil, bunga riil tingkat, inflasi, keseimbangan fiskal dan rasio PDB

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat ini, hubungan antarnegara khususnya di bidang ekonomi sangatlah terbuka luas dan bebas yang memberikan sisi positif maupun negatif. Integritas antara negara miskin, negara berkembang, dan negara maju sangatlah tinggi sehingga membuat arus modal yang masuk dan keluar pada suatu negara menjadi lebih cepat, khususnya negara berkembang yang beberapa periode ini sangatlah diminati oleh investor. Tetapi di lain sisi, suatu negara mengalami kerentanan perekonomian terhadap guncangan (shock) yang berasal dari luar. Terjadinya krisis sektor perbankan secara berpengaruh langsung maupun tidak langsung dengan berbagai aktivitas bank dalam keseharian. Menurut Hadad, dkk (2003)

dampak langsung dari krisis tersebut diantaranya dari sisi penghimpunan dana besarnya jumlah dan komposisi simpanan masyarakat yang berpengaruh terhadap kestabilan perbankan. Penarikan dana besar-besaran dalam waktu singkat berdampak negatif pada likuiditas bank yang berpengaruh juga kepada solvabilitas bank (kemampuan bank untuk melunasi hutang jangka panjangnya). Sedangkan dari sisi penyaluran dana, komposisi aktiva produktif menentukan ketahanan bank dalam menghadapi permasalahan dari faktor eksternal perbankan.

Krisis perbankan yang terjadi pada tahun 1997/1998 memberikan pelajaran berharga bahwa berbagai permasalahan di sektor perbankan yang tidak terdeteksi secara dini akan mengakibatkan runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap

Author Correspondence:

E-mail: nadidasri@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.33005/jdep.v1i1.68>

industri perbankan. Selain itu, upaya pemulihan kondisi perbankan nasional dan peningkatan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Bahkan dampak krisis tersebut tidak hanya mencakup pada sektor perbankan saja melainkan meluas ke berbagai sektor lainnya.

Pada pertengahan hingga akhir tahun 2008, perekonomian dunia juga mengalami krisis ekonomi global. Krisis yang terjadi dirasakan oleh hampir seluruh negara dunia, khususnya negara maju. Belajar dari krisis Perbankan yang terjadi pada tahun 1997/1998, beberapa upaya pemulihan perbankan nasional serta peningkatan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan memerlukan biaya yang tidak sedikit dan tidak hanya mencakup pada sektor perbankan saja, melainkan meluas hingga ke sektor lain. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2008 akibat dari krisis ekonomi global membuat Bank Indonesia dan lembaga-lembaga penelitian ekonomi di Indonesia melakukan analisa peringatan dini melalui industri perbankan. Terdapat 19 bank dari 125 bank yang diamati, yang berpotensi masuk pengawasan intensif BI karena angka kredit macet (NPL) di atas 5%. Meski tidak ada satu pun bank yang masuk dalam pengawasan khusus (SSU).

Belajar dari pengalaman krisis masa lalu diperlukan suatu mekanisme dalam mendeteksi dan mengantisipasi krisis mata uang yang terjadi pada masa yang akan datang dengan menganalisis berbagai indikator yang diduga menyebabkan krisis tersebut. Dalam sistem peringatan dini, dikembangkan indikator-indikator makroekonomi yang dapat memperingatkan kerentanan suatu negara terhadap ancaman terjadinya krisis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinyal dini dari krisis perbankan yang disebabkan oleh fundamental ekonomi yang terdiri dari sektor publik dan domestik riil, neraca modal dan transaksi berjalan, sektor keuangan dan perekonomian global, serta mempersiapkan cara antisipasi terjadinya krisis tersebut.

KAJIAN PUSTAKA

Krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada tahun 1998 merupakan krisis yang paling parah dalam sejarah orde baru. Menurut Mishkin (2004) mendefinisikan krisis keuangan sebagai

gangguan terhadap pasar keuangan dimana masalah adverse selection dan moral hazard memburuk sehingga pasar keuangan tidak dapat menyalurkan dana secara efisien kepada pihak yang memiliki peluang investasi yang paling produktif. adverse selection berpotensi besar menimbulkan kredit macet, yang meminjamkan (lender) mungkin tidak meminjamkan meskipun di pasar terdapat debitur yang memiliki risiko kredit yang rendah. Moral hazard terjadi akibat informasi asimetrik dimana lender kurang mengetahui aktivitas borrower yang memungkinkan borrower melakukan moral hazard. Konflik kepentingan antara keduanya akibat moral hazard menunjukkan bahwa banyak lender memutuskan untuk memberikan pinjaman, sehingga kredit dan investasi tidak mencapai tingkat optimal.

Allan dan Gale (1999) mengidentifikasi bahwa penyebab timbulnya krisis ekonomi disebabkan oleh siklus kredit di sebuah perekonomian. Borio et al. (1994) menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan kemudahan pemberian pinjaman (kredit), sehingga menyebabkan timbulnya permintaan yang banyak atas kredit. Pertumbuhan kredit tersebut memicu terjadinya inflasi dan hal tersebut diperburuk lagi dengan kepailitan debitur akibat pengurangan daya beli masyarakat.

Di lain pihak, Eichengreen, Rose, dan Wyplosz (1994,1995,1996) mengemukakan tentang pengaruh penetapan batas nilai tukar uang (currency pegged) dalam mempengaruhi krisis. Menurut ERW (singkatan dari Eichengreen, Rose, dan Wyplosz), krisis ekonomi finansial akan terjadi apabila nilai pasar mata uang turun drastis sedangkan industri memerlukan pasokan bahan baku untuk produksi. Pada akhirnya, hal tersebut semakin memperburuk kondisi sebuah industri dengan proporsi input tradable yang besar.

Dornbush (2001) mengemukakan tentang beberapa tipe krisis; tipe krisis pertama adalah krisis ekonomi dengan tipe lambat (slow motion crises). Tipe ini merupakan jenis krisis yang sudah biasa terjadi dan dalam menjelaskan proses terjadinya krisis menggunakan asumsi ekonomi lama (old style). Konsep krisis ekonomi tersebut melibatkan siklus perbelanjaan yang berlebih serta adanya apresiasi di sektor riil

(Dornbush,2001). Krisis terjadi karena unsur politis dalam pemerintahan, di saat sumber daya tersedia dengan jumlah yang banyak, maka pemerintah pada saat itu mengeluarkan hambatan. Hambatan tersebut berupa pengendalian permintaan dan pembatasan volume perdagangan melalui instrumen moneter. Sementara itu, tipe krisis yang kedua menitikberatkan kepada dominasi peranan dan kredit atas sektor swasta maupun publik dalam perekonomian dan mekanisme nilai tukar yang berlaku. Perilaku khusus tersebut berimplikasi kepada rapuhnya perekonomian dan terwujud dalam tiga hal, yaitu substansi penyesuaian nilai tukar yang tidak sesuai, komponen non performing loans yang besar dalam perekonomian dan permasalahan ketidaksesuaian alokasi perekonomian. Pada konsep ini, krisis terjadi karena adanya penghentian secara mendadak penawaran kredit disektor moneter (Teussig dalam Dornbusch, 2001). Dalam tataran aplikatif, krisis ekonomi dapat dibedakan menjadi beberapa kategori. Kategori pertama adalah krisis nilai tukar (currency crises), yang kedua adalah krisis perbankan (banking crises) dan yang ketiga adalah akibat pembayaran hutang (debt crises). Ketiganya mempunyai perbedaan cara penentuan periode krisis serta konteks definisi yang berbeda pula.

Menurut Lestano (2003), Determinan terjadinya krisis dibagi menjadi beberapa sektor, yaitu i) sektor eksternal (current account) yaitu Real Exchange Rate dan Terms of Trade, (ii) sektor eksternal (capital account) yaitu Rasio M2 terhadap cadangan devisa; (iii) sektor keuangan yaitu rasio kredit domestik terhadap GDP, tingkat bunga riil domestik, rasio cadangan terhadap aset bank, Real Domestic Credit growth, Real GDP Growth; serta (iv) sektor publik dan domestik riil yaitu Rasio keseimbangan fiskal terhadap GDP, tingkat inflasi dan GDP perkapita.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Demirguc-kunt dan Fetraigiache, 1998; Barbara Casu et al., 2011; Claessens et al., 2010; Kaminsky dan Reinhart, 1999; Borio dan Lowe, 2002; Reihart dan Rogoff, 2007; Agnello & Schuknecht, 2011 dalam Dregger & Kholodilin, 2007) mengidentifikasi krisis perbankan berdasarkan beberapa kondisi sebagai berikut:

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Demirguc-kunt dan Fetraigiache, 1998; Barbara Casu et al., 2011; Claessens et al., 2010; Kaminsky dan Reinhart, 1999; Borio dan Lowe, 2002; Reihart dan Rogoff, 2007; Agnello & Schuknecht, 2011 dalam Dregger & Kholodilin, 2007) mengidentifikasi krisis perbankan berdasarkan beberapa kondisi sebagai berikut:

- Biaya untuk penyelamatan sistem perbankan mencapai 2% dari PDB.
- Harga aset yang meningkat pesat termasuk harga kenaikan harga rumah lebih dari 30% selama 5 tahun sebelum krisis.
- Terjadi pengalihan kepemilikan bank-bank secara besar-besaran kepada pemerintah.
- Pertumbuhan kredit yang tajam dan berkelanjutan menjelang krisis.
- Adanya deregulasi oleh bank sentral dan pemerintah terkait dengan pasar properti terutama dalam penyetatan kebijakan harga.
- Ekspansi dramatis dalam berbagai pinjaman marjinal, terutama di pasar hipotek.
- Adanya regulasi dan pengawasan terhadap lembaga keuangan yang gagal mengikuti perkembangan ekonomi.
- Terjadi “bank-run” yang meluas atau terdapat tindakan darurat yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk pembekuan simpanan masyarakat, penutupan kantor-kantor bank dalam jangka waktu yang cukup panjang, atau pemberlakuan penjaminan simpanan yang menyeluruh.

Menurut Demirguc-kunt dan Fetraigiache, 1998; Barbara Casu et al.,2011. ”Periode krisis dinyatakan terjadi apabila memenuhi salah satu kondisi tersebut”.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, periode krisis perbankan ditentukan dari adanya peristiwa-peristiwa diluar keadaan normal yang terjadi di dunia perbankan. Kriteria “peristiwa diluar batas normal” pada krisis perbankan, ditemukan beberapa periode krisis perbankan. yang telah dijabarkan satu persatu peristiwa penting (diluar batas normal) yang dapat dikategorikan sebagai periode krisis perbankan sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Demirguc-kunt dan Fetraigiache, 1998; Barbara Casu et al., 2011; Claessens et al.,

2010; Kaminsky dan Reinhart, 1999; Borio dan Lowe, 2002; Reihart dan Rogoff, 2007; Agnello & Schuknecht, 2011 dalam Dregger & Kholodilin, 2007. berdasarkan rentang waktu penelitian yakni tahun 1990 hingga 2016,terdapat 45 bulan krisis perbankan dalam 13 periode yaitu November (1995) April (1997), Agustus (1997), September (1997),November (1997), Desember (1997), Januari (1998), Februari (1998), April (1998), Mei (1998), Juni (1998), Juli (1998), Agustus (1998), Oktober (1998), Desember (1998), Januari (1999), Maret (1999), April (1999), Juli (1999), Juni (2000), Oktober (2000), Oktober (2001), November (2001), September (2002), Maret(2004), April (2004), Juni (2004), November (2004), Desember (2004), Januari (2005), Maret (2005), Juli (2005), Agustus (2005), september(2005), Desember (2007), Februari (2008), Juli (2008), Agustus (2008), Oktober (2008), November (2008), Desember (2008), Juni (2009), Desember (2009), Januari (2013), April (2014).

Tabel 1. Matriks Sinyal Indikator Dan Posisi Threshold

No.	Indicator	A	B	C	D	Ambang batas optimal	Posisi indikator atas threshold
1	M2/reserve	23	19	142	56	50,73397	Atas
2	Inflasi	12	2	152	74	2,313093	Atas
3	Real Exchange Rate	14	7	151	68	14.944,45	Atas
4	Real Domestic Credit Growth	5	0	159	76	9,45	Atas
5	Real Interest Rate	22	2	143	75	20,469469	Atas
6	Real GDP Growth	156	60	22	2	7,36607	Bawah
7	Rasio Fiscal Balance/ GDP	16	25	149	50	0,090341	Atas
8	Rasio Kredit Domestik / GDP	14	11	150	65	1,24718	Atas
9	GDP per Kapita	134	65	35	16	241,0649	Bawah
10	Rasio Bank Reserves / Bank Asset	140	50	40	10	0,101796	Bawah
11	Indeks Harga Saham Gabungan	150	39	16	35	3262,307	Bawah
12	Indeks Harga Rumah Ritel	31	1	134	74	136,4568	Atas
13	Kredit Properti	6	5	163	66	5,935809	Atas

Keterangan:

A = Jumlah bulan dimana indikator menunjukkan sinyal baik, yaitu sinyal yang muncul diluar ambang batas dan dalam kurun waktu 12 bulan terjadi krisis, indikator dalam penelitian melewati

batas pagu ketentuannya (threshold) B = Jumlah bulan dimana indikator menunjukkan sinyal palsu atau gangguan, dimana sinyal tersebut muncul diluar ambang batas akan tetapi dalam kurun waktu 12 bulan kedepan sejak sinyal tersebut muncul tidak ada peristiwa krisis perbankan yang terjadi, sehingga matriks B tergolong sinyal palsu.

C = Jumlah bulan dimana indikator tidak menunjukkan sinyal terjadinya krisis (tidak ada indikator yang melewati ambang batas), akan tetapi dalam kurun waktu 12 bulan berikutnya terjadi krisis perbankan, sehingga matriks C tergolong sinyal palsu D = Jumlah bulan dimana indikator tidak menunjukkan sinyal terjadinya krisis dan dalam kurun waktu 12 bulan juga tidak terjadi peristiwa krisis.

Berdasarkan hasil dari periodisasi krisis, ditentukanlah leading indicators dengan melihat pola atau perilaku indicators yang diduga dapat memprediksi krisis perbankan dengan menentukan ambang batas setiap variabel (threshold), sehingga menghasilkan suatu sinyal krisis. Sinyal tersebut dihasilkan berada dibatas atas atau bawah ambang batas dalam suatu variabel ekonomi menandakan bahwa terdapat probabilitas lebih tinggi atas terjadinya krisis keuangan. Variabel yang digunakan adalah variabel dari empat sektor yang telah dijabarkan diatas sesuai dengan penelitian oleh Lestano (2003).

Perilaku setiap Indikator terhadap batas ambang (threshold) memberikan sinyal yang dapat mencerminkan krisis yang akan terjadi ataupun tidak. Akan tetapi, tidak semua sinyal yang dikeluarkan oleh leading indicators merupakan sinyal yang baik atau benar. selain sinyal bagus (good signal), dan sinyal palsu (false signal) juga terdapat jenis sinyal lainnya yaitu noise to signal ratio (NSR) yang merupakan rasio sinyal palsu terhadap sinyal bagus dan rasio ini memiliki peran penting dalam menentukan sistem peringatan dini sebelum terjadinya krisis. Rasio ini berfungsi untuk mengukur jumlah sinyal yang salah (kesalahan tipe II) sebagai rasio terhadap sinyal benar (1–kesalahan tipe 1). NSR didefinisikan dengan:

$$NSR = \frac{B}{(B+D)} \div \frac{A}{(A+C)}$$

Sehingga, semakin kecil rasio ini, maka semakin baik sinyal palsu (false signal) menjadi sinyal bagus (good sinal) dimana $NSR < 1$. Jika indikator

dari rasio ini sama dengan satu maka memperlihatkan false signal = good signal dimana nilai NSR sama dengan 1. Bila NSR lebih besar dari 1 maka variabel tersebut tidak layak dijadikan sebagai leading indicator karena variabel memiliki rasio sinyal palsu yang signifikan. Selain NSR, syarat lain yang harus dipenuhi oleh setiap variabel untuk terpilih untuk menjadi leading indicators adalah besarnya probability of crisis (PC) yang harus lebih besar dari 50%. Nilai PC digunakan untuk mengukur probabilitas terjadinya krisis setelah sinyal dikeluarkan oleh suatu indikator. Nilai PC yang semakin besar maka semakin baik dengan nilai maksimal adalah 100%. NSR dan probabilitas krisis sebagai berikut:

Tabel 2. Noise to Signal Ratio dan Probabilitas Krisis

Indikator	A	B	C	D	A/(A+C)	B/(B+D)	NSR	Probabilitas Krisis PC = A/A+B
m2/reserve	23	19	142	56	0,139394	0,25333	1,817391	0,0547619
Inflasi*	12	2	152	74	0,073171	0,026316	0,026316	0,857143
RER	14	7	151	68	0,08484848	0,933333	1,1	0,666667
RDCG	5	0	159	76	0,030488	0	0	1
IRR*	22	2	143	75	0,13333333	0,025974	0,1948052	0,9166667
RYG	156	60	22	2	0,8764	0,96774	1,10422	0,72222
FSY	16	25	149	50	0,09697	0,33333	3,4375	0,390244
DCY	14	11	150	65	0,08537	0,14474	1,69549	0,56
GDPG	134	65	35	16	0,792899	0,802469	1,012069	0,673367
RRA	140	50	40	10	0,77778	0,833333	1,071429	0,736842
IHSG*	150	39	16	35	0,903614	0,527027	0,583243	0,793651
IHRR*	31	1	134	74	1,187879	0,013333	0,070968	0,96875
KPR	6	5	163	66	0,035503	0,070423	1,983568	0,545455

Berdasarkan hasil olah data Tabel 2, terdapat 4 variabel yang memiliki NSR kurang dari 1 selama periode penelitian, artinya variabel tersebut bagus digunakan dalam penelitian guna melihat potensi sinyal palsu terhadap sinyal baik semakin kecil. Keempat variabel yang dimaksud adalah inflasi, real exchange rate, real interest rate, dan fiscal balance / GDP. Dengan menggunakan estimasi model logit dapat terlihat seberapa besar elastisitas atau pengaruh keempat leading indicators terpilih sebagai variabel-variabel yang dapat memicu terjadinya krisis perbankan di Indonesia. Sehingga persamaan yang dipakai adalah sebagai berikut:

$$CSD_i = \ln \left(\frac{P_i}{1 - P_i} \right) = \beta_1 + \beta_2 RER_i + \beta_3$$

$$INFL_i + \beta_4 IRR_i + \beta_5 FSY_i + \epsilon_i$$

Dimana:

CSDi = Crisis Severe Distress

Pi = kemungkinan (probabilitas) terjadinya krisis
 (1 - Pi) = kemungkinan (probabilitas) tidak terjadinya krisis

β1 = intercept

β2 β3 β4 β5 = Koefisien variabel bebas

εi = error term

RER = Real Exchange

Rate INFL = Inflasi

FSY = Rasio fiscal balance dengan

GDP IRR = Real Interest Rate

Model logit dalam penelitian ini adalah model yang melibatkan 240 observasi dengan 47 observasi bernilai 1 (krisis) dan 193 buah observasi bernilai 0 (tidak krisis).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari estimasi logit seperti yang tertera pada Tabel 3 dibawah ini, keempat variabel tersebut, yaitu Inflasi, indeks harga rumah riil, Real Interest Rate, dan indeks harga saham gabungan signifikan terhadap terjadinya krisis perbankan di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada probailitas pada setiap hasil estimasi logit masingmasing variabel.

Berdasarkan hasil dari estimasi logit seperti yang tertera pada Tabel 3 di atas, keempat variabel tersebut signifikan terhadap terjadinya krisis perbankan di Indonesia. Signifikan atau tidaknya variabel hasil dari estimasi tersebut atas pengaruhnya terhadap krisis perbankan, dapat dilihat pada probabilitas yang dimiliki oleh masingmasing variabel. Pada variabel IRR atau real interest rate memiliki nilai probabilitas yang lebih kecil dari tingkat signifikansi (), yaitu 10%. Begitu pula dengan INFL (inflasi) dan FSY (rasio fiscal balance / GDP) juga memiliki signifikansi pada tingkat level 5% serta RER (real exchange rate) yang juga signifikan pada tingkat level 1%.

Selain itu, dari hasil regresi menunjukkan bahwa McFadden R-square sebesar 0.257505 yang berarti bahwa hanya sekitar 26% terjadinya krisis dan tidak terjadinya krisis pada krisis perbankan dapat dijelaskan oleh model, sisanya sebesar 74% dijelaskan oleh variabel diluar model. Artinya, probabilitas terjadinya krisis perbankan di Indonesia karena faktor non ekonomi, seperti politik dan keamanan yang tidak kondusif yang memberikan peluang (probabilitas) yang lebih besar untuk menciptakan krisis perbankan. Faktor moral hazard dan adverse selection tampaknya

memang merupakan sebab akutnya dan dahsyatnya krisis di Indonesia terutama pada sektor perbankan. Sedangkan berdasarkan count-R Square menunjukkan 0.8706 yang berarti bahwa terdapat 202 dari 232 observasi yang sesuai dengan prediksi.

Nilai LR statistik walaupun hanya sebesar 46.00948 dengan p-value sebesar 0.000 yang berarti bahwa variabel-variabel bebas secara bersama-sama dapat menjelaskan model sehingga variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya krisis. Indikator yang mempengaruhi terjadinya krisis perbankan salah satunya adalah nilai tukar. Berdasarkan hasil estimasi logit, nilai tukar memiliki hubungan positif dengan krisis perbankan. Semakin tinggi nilai rupiah per dollar (rupiah mengalami depresiasi), maka semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya krisis perbankan. Ketika nilai rupiah terdepresiasi besar-besaran, saat itu pula perusahaan-perusahaan serta perbankan yang bermain dalam valas (baik simpanan, saham, maupun pinjaman) mengalami gejolak. Perusahaan serta perbankan tersebut tidak mampu untuk memenuhi kewajiban hutang dalam valas yang cukup tinggi, akibatnya banyak perusahaan dan perbankan yang collaps dan akhirnya tutup.

Menurut Erwin (2008), masih prematurnya perekonomian Indonesia untuk bergabung dalam ekonomi global pada saat krisis ekonomi 1997/1998 menjadi suatu alasan mengapa Indonesia begitu terpuruk. Dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, akan tetapi fundamental ekonomi yang masih lemah membuat perekonomian Indonesia begitu rentan atas adanya guncangan. Pada saat krisis tersebut arus modal asing yang dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek dalam negeri dalam waktu yang bersamaan mengalami jatuh tempo.

Arus modal asing tersebut merupakan bentuk dari hutang jangka pendek pemerintah maupun swasta dengan menggunakan mata uang asing akan tetapi pengalokasiannya menggunakan mata uang domestik. Sehingga, ketika mengalami jatuh tempo, maka kebutuhan akan valas yang digunakan untuk membayar pinjaman tersebut meningkat. Pada saat itu, kemampuan bank sentral dalam memenuhi permintaan valas yang begitu besar sangatlah terbatas karena sebagian dari cadangan devisa tersebut digunakan untuk menjaga nilai

tukar agar tetap stabil, hal inilah yang membuat nilai tukar rupiah semakin terdepresiasi. Begitupula yang terjadi pada saat krisis ekonomi global 2008, yang bermula dari jatuhnya perusahaan raksasa di Amerika Serikat lalu berimbas pada negara-negara di dunia khususnya Eropa, tidak terkecuali perekonomian Indonesia walaupun hanya sedikit dampak yang dirasakan oleh Indonesia. Menurut Bank Indonesia (2009), kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara maju yang terkena dampak, terutama Amerika Serikat, mengalami gangguan yakni terjadinya penurunan ekspor yang berimbas pada kerugian para produsen domestik, serta peningkatan harga impor sehingga para produsen yang menggunakan barang baku dari luar negeri sangatlah menggerus biaya produktivitas mereka. Akibatnya, banyak perusahaan-perusahaan domestik collaps, dan tidak sedikit diantara perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kredit pada sektor perbankan. Sehingga, hal ini dapat memicu terjadinya peningkatan kredit macet yang dapat menyebabkan terjadinya krisis perbankan.

Selain nilai tukar, indikator selanjutnya adalah rasio fiscal balance per GDP. Berdasarkan hasil estimasi logit, indikator ini berhubungan negatif terhadap terjadinya krisis perbankan. Sehingga, semakin rendah nilai rasio ini, maka akan dapat meningkatkan terjadinya krisis perbankan. Rasio ini menggambarkan adanya peran pemerintah dalam mempengaruhi kinerja perbankan. Sehingga, adanya campur tangan pemerintah dapat mengurangi probabilitas terjadinya krisis perbankan. Fauzi Ikhsan (2010), mengatakan bahwa dengan meningkatnya belanja pemerintah menyebabkan kondisi perekonomian positif, sehingga kredit yang disalurkan oleh perbankan akan meningkat.

Berjalannya proyek-proyek pemerintah menyebabkan daya serap kredit tumbuh sehingga terjadi peningkatan kinerja perbankan. Selanjutnya, pemerintah juga memiliki peran dalam pemulihan kondisi perbankan ketika perbankan mengalami gejolak melalui kebijakan-kebijakan yang responsif seperti menaikkan jaminan dana nasabah dari Rp 100 juta menjadi Rp 2 miliar oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), adanya Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) diperuntukkan bagi bank yang kesulitan dalam likuiditas yang dijamin oleh pemerintah serta pemerintah juga memberikan

intensif kepada bank atau lembaga keuangan bukan bank untuk mengakuisisi bank atau LKBB lainnya. Sehingga, dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut diatas dapat mengurangi probabilitas terjadinya krisis perbankan. Indikator ketiga adalah inflasi. Berdasarkan dari hasil estimasi logit, Inflasi berpengaruh positif pada krisis perbankan. Artinya, bahwa ketika inflasi meningkat, maka probabilitas terjadinya krisis perbankan juga akan meningkat. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan perbankan maupun masyarakat mengalami kekurangan likuiditas.

Disatu sisi, ketika inflasi kian meningkat, harga-harga secara keseluruhan mengalami peningkatan pula, sehingga masyarakat sebagai konsumen pun butuh uang lebih banyak, sehingga terjadi penarikan simpanan masyarakat yang cukup besar yang membuat likuiditas perbankan berkurang. Indikator terakhir yang menurut dari hasil estimasi logit signifikan terhadap adanya krisis perbankan adalah suku bunga. Menurut Kunt (1998), pengendalian inflasi dijaga dengan pengetatan kebijakan moneter yang dilihat dari sudut pandang stabilitas sektor perbankan, akan tetapi, kebijakan yang ditetapkan dalam program stabilisasi dapat meningkatkan suku bunga riil. Adanya peningkatan pada suku bunga riil ini, apabila terlalu berlebihan dapat mengakibatkan kerentanan pada perbankan yang dapat mengakibatkan terjadinya krisis perbankan. Kebijakan pengetatan moneter melalui peningkatan suku bunga ini dapat menimbulkan permasalahan baru dalam kredit yang disalurkan oleh perbankan yaitu probabilitas atas kredit macet dapat meningkat dan ini dapat membahayakan sektor perbankan yang dapat berujung pada krisis perbankan. Tidak hanya kredit macet yang terjadi, minat para investor untuk berinvestasi menjadi berkurang serta dapat pula berdampak pada penurunan produktivitas perusahaan-perusahaan yang memiliki kredit di perbankan.

Selain digunakan untuk pengendalian inflasi, peningkatan suku bunga ini juga merupakan salah satu kebijakan untuk mencegah adanya capital outflow. Sehingga, dengan “iming-iming” suku bunga yang tinggi, diharapkan para pemegang dana besar tidak melarikan uangnya ke luar negeri karena adanya gain atas suku bunga yang mereka dapatkan. Pasca diterapkannya Inflation Targeting Framework (ITF) sebagai kerangka kerja dari

kebijakan moneter pada tahun 2005, orientasi utama kebijakan moneter adalah pada tingkat inflasi. Dengan tujuan mengendalikan inflasi, nilai BI rate pun dari tahun ke tahun mengalami penyesuaian.

Diberlakukannya ITF pada tahun 2005, BI rate tertinggi terjadi pada tahun 2006, nilainya mencapai 12,75%. Ketika memasuki pertengahan 2008, akibat adanya resesi AS dan kenaikan harga minyak dunia yang mempengaruhi perekonomian global, BI rate, yang sebelumnya bergerak menurun, akhirnya terpaksa untuk dinaikkan sampai sebesar 9,5%. Terakhir, penurunan harga minyak secara drastis mencapai US\$ 34 per barrel menyebabkan otoritas moneter mau tidak mau harus menurunkan BI rate hingga mencapai 8,5% pada awal tahun 2009. Akan tetapi, penurunan BI rate ini tidak membuat perbankan menurunkan tingkat bunga kreditnya agar dapat membantu menggerakkan sektor riil. Selama ini, respon perbankan atas berubahnya BI rate membutuhkan waktu 3-6 bulan, tergantung dengan kebijakan penentuan bunga masing-masing bank.

KESIMPULAN

Krisis Perbankan yang telah terjadi di beberapa waktu yang lalu menimbulkan biaya yang besar dalam membangun kembali sistem perekonomian yang lesu atas dampak dari krisis yang terjadi. Sehingga diperlukan suatu sistem yang dapat mendeteksi secara dini sebagai upaya pencegahan krisis yang akan terjadi di masa yang akan datang, yaitu Early Warning System (EWS). Dengan menggunakan determinasi sektor domestik dan eksternal sebagai variabel determinan. Pada literatur berbagai jenis model yang disarankan, penelitian ini menggunakan model respon kualitatif, yaitu logit atau probit. Dari literatur, kami melakukan pendektan sinyal atau pengekstrak sinyal-sinyal yang berpotensi menimbulkan krisis dimasa yang akan datang. Dari hasil mengekstrak sinyal, didapatkan leading indicators yang paling rentan menimbulkan krisis perbankan, yaitu inflasi, real exchange rate, real interest rate, dan fiscal balance / GDP.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, Lincolin. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPFE, Yogyakarta.

- Agnello, Luca, dan Ludger Schuknecht. 2011. Booms and bust in housing markets: Determinants and implications. (online), (<http://www.sciencedirect.com/science/pii/S1051137711000155>, diakses April 2015).
- Bank Indonesia. 2013. Survei Harga Properti Residensial triwulan III tahun 2013. (online),(<http://www.bi.go.id/id/publikasi/survei>, diakses Agustus 2015).
- Borio, C. Dan Lowe, P. 2002. Assessing The Risk of Banking Crises. BIS Quarterly Review (December), (online), (www.bis.org/publ/.../r_qt0212e.pdf, diakses 7 April 2015).
- Brueckner, Jan K., Paul S. Calem, dan Leonard I. Nakamura. 2012. Subprime Mortgages and The Housing Bubble. Journal of Urban Economics 71, (online), (<http://cep.lse.ac.uk/seminarpapers/05-12-11-JB.pdf>, diakses 11 Agustus 2015)
- Claessens, Stijn, M. Ayhan Kose and Marco E. Terrones. 2010. The Global Financial Crisis: How Similar? How Different? How Costly?,(online), (www.sciencedirect.com/science/.../S1049007810000047, diakses 15 April 2015).
- Dermirguc, Kunt, A. and E. Detragiache. 1997. The Determinants Of Banking Crises In Developing And Developed Countries. IMF Working Paper 106. International Monetary Fund: Washington, D.C.
- Dermirguc, Kunt, A. and E. Detragiache. 2000. Monitoring Banking Sector Fragility: A Multivariate Logit Approach. World Bank Economic Review: 14(2), 287–307.
- Dornbusch, Rodiger dan Stanley Fischer, Richard Startz. 2001. Macroeconomics. New York: Eight Edition.McGraw-Hill.
- Dreger, Christian dan Konstantin A. Kholodilin. 2013. An Early Warning System to Predict Speculative House Price Bubbles. The Open-Access, Open-Assessment E-journal vol , 2013-8
- Edison, H. J. (2003). Do Indicators Of Financial Crises Work? An Evaluation Of An Early Warning System. International Journal of Finance and Economics. 8(1), 11–53.
- Eichengreen, B. and C. Arteta. 2000. Banking Crises In Emerging Markets: Presumptions And Evidence. Working Papers 115, Center for International and Development Economics Research: California, Berkeley.
- Hadad, Muliaman D., Wimboh Santoso dan Bambang Arianto. 2003. Indikator Awal Krisis Perbankan. Jurnal Ekonomi Bank Indonesia. Jakarta : Bank Indonesia.
- Kaminsky, Graciela L. 1999. Currency and Banking Crisis : The Early Warning of Distress. Washington : IMF Working Paper.
- Kunt, Dermiguc and Enrica Detragiache, 1998, “The Determinants of Banking Crises in Developing and Developed Countries”, Washington: IMF Staff Papers Vol. 45 No. 1 (March), International Monetary Fund..
- Lestano, Gerard H. kuper dan Jan Jacobs. 2003. Indicators of Financial Crisis do work! An Early Warning System for Six Asian Countries. Departement of Econoics, University of Gronigen.
- Mishkin, Federick S. 2004. Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan. Edisi kedelapan. Terjemahan oleh Lana Soelistianingsih dan Beta Yuliana G 2009. Jakarta: Salemba Empat.
- Reinhart, M.C. dan Rogoff, S.K.. 2008. Is the 2007 US Sub-Prime Financial Crisi so Different? An International Historical Comparison. American Economic Review. NBER Working Paper.